

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian mengenai etika politik sebagai ketentuan normatif yang berbicara mengenai dimensi politis kehidupan manusia demi kesejahteraan bersama menurut *Gaudium et Spes* artikel 74, maka kesimpulan yang dapat dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut: Bahwasannya, Etika Politik berkaitan dengan moral. Apabila suatu politik dalam suatu Negara beretika maka cita-cita bangsa untuk hidup makmur, adil dan sejahtera akan terwujud. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka buruk, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif.

Banyaknya penyimpangan etika politik yang terjadi disebabkan diantaranya karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, longgarnya pedoman agama yang dianut masyarakat, kurang tegasnya tindak hukum, dan krisis moral yang terjadi masyarakat. Salah satu upaya untuk menerapkan dan mengatasi penyimpangan politik yaitu mendayagunakan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik dan pada saat yang sama membenahi birokrasi sehingga “lubang-lubang” yang dapat dimasuki tindakan-tindakan menyimpang dapat ditutup.

Salah satu ciri suatu Negara yang tatanan politisnya baik ialah masyarakatnya semakin cerdas dan turut berpartisipasi aktif dalam dinamika politik untuk mencapai tujuan bersama. Outputnya, kebijakan politis membawa manfaat yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Maka semestinya tahun politik diisi dengan pendidikan politik bagi warga negara agar semakin cerdas dan berpartisipasi dalam dinamika politik negeri ini. Yang dapat dilakukan masyarakat adalah mengontrol dan turut berpartisipasi aktif dalam

merumuskan kebijakan publik di semua tingkatan. Masyarakat dapat bekerjasama dengan lembaga pers/media, organisasi non pemerintah, komunitas-komunitas dan lembaga publik untuk menyalurkan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, mencermati para calon legislatif atau calon presiden, dan bersikap kritis terhadap kebijakan publik.

Rekam jejak dari para politisi dan partai yang mengusungnya mesti menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat saat harus mengambil keputusan dalam pemilu 2018 nanti. Dengan demikian masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika politik untuk menentukan pemimpinnya dan kebijakan publik yang mereka buat. Sudah saatnya masyarakat tidak hanya menjadi korban atau pihak yang diperalat untuk pragmatisme politis dari segelintir orang atau partai politik. Akhirnya, diharapkan politik dapat dikelola dengan baik untuk kebaikan bersama (*bonum commune*).

5.2 Saran

Penerapan etika politik sepatutnya tetap menghargai hak-hak orang lain dan menghormati perbedaan sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan harmonis tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan orang lain. Agar tidak terjadi penyimpangan etika politik yang berkepanjangan mungkin perlu dilakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap seluruh lembaga pemerintahan. Secara sederhana pengawasan berarti proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita Gereja dan Negara.

5.3 Refleksi Kritis

Bagi Gereja Katolik Indonesia, Negara adalah institusi politik untuk menjamin dan menciptakan kondisi yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup secara sejahtera. Namun Negara tidak berhak untuk mengatur segala-galanya. Negara semacam itu adalah Negara

totaliter, dan Negara totaliter itu bertentangan dengan martabat manusia. Tetapi Negara berhak untuk memberikan aturan-aturan kelakuan dan pergaulan yang pasti dan yang tidak dapat dibiarkan pelanggarannya.

Berkaitan dengan eksistensi agama-agama di dalam Negara, *Gaudium et Spes* mengungkapkan bahwa Negara wajib untuk di satu pihak menjamin kondisi sosial agar agama-agama itu dapat hidup dan berkembang, dan di lain pihak untuk menghormati kebebasan beragama.

Di sini kebebasan beragama mempunyai dua segi utama: pertama, hak setiap orang untuk hidup sesuai dengan keyakinannya, dan kedua, kebebasan masing-masing agama untuk mengurus dirinya sendiri. Agama-agama sebagai badan sosial dalam masyarakat berhak untuk mengurus diri mereka sendiri dan untuk tidak dicampuri oleh Negara dalam urusan intern, baik ajaran dan ibadatnya, maupun segi organisasinya.

Tetapi bagaimana kalau Negara membuat sesuatu kebijakan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki sebuah agama? Jawaban Gereja adalah bahwa konflik seperti ini bisa saja terjadi. Namun di sini kita perlu bedakan antara kebijakan Negara yang mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan suara hati kita dan kebijakan Negara yang tidak mengizinkan kita untuk mengambil suatu sikap menurut keinginan kita.

Pertama, berkaitan dengan kebijakan Negara yang bertentangan dengan kesadaran suara hati, harus ditolak, karena hal itu bertentangan dengan martabat manusia. Tetapi dalam hal yang *kedua*, yaitu kita tidak diizinkan untuk mengikuti keinginan kita sendiri, memang harus diterima. Karena, tidak mungkinlah kita mengharapkan bahwa segala keinginan kita dipenuhi oleh Negara.

Kemungkinan konflik seperti itu dapat dikurangi manakala Negara diselenggarakan secara benar-benar demokratis, di mana perundangan dan pemerintahan dijalankan

berdasarkan kehendak masyarakat dan nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat. Jadi Negara tidak dapat dijalankan secara pragmatis belaka. Negara memerlukan suatu dasar etis, dan dasar itu seharusnya keyakinan-keyakinan moral masyarakat sendiri.

Karena itu, di sini *Gaudium et Spes* memberi pesan bagi Gereja Katolik Indonesia agar aktif mendorong pemajuan demokrasi di Indonesia. Karena, makin demokratis sebuah Negara, maka makin besar sikap hormatnya terhadap hak-hak asasi manusia; makin besar penghormatan hak-hak asasi manusia, maka makin kecil kemungkinan bahwa Negara akan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Karena partai politik adalah bagian konstitutif dari demokrasi itu, maka Gereja Katolik Indonesia juga perlu mendukung eksistensi partai-partai politik dan mendorong pembangunan demokrasi bagi mereka. Partai politik memiliki tugas untuk menunjang keterlibatan luas dalam tanggung jawab publik. Partai politik dituntut untuk menemukan apa sebenarnya keinginan masyarakat dan mengarahkan keinginan itu kepada kesejahteraan umum dan membuka kemungkinan yang efektif kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik seperti kebijakan pembangunan.

Untuk itu, partai politik harus bersifat demokratis. Hanya dengan semangat demokratis, segala pertentangan dan persaingan politik yang terjadi di dalam tubuh partai politik dan antara partai politik, dapat diatasi dengan cara yang memadai, dan akhirnya partai politik bisa berkembang dan mampu membuat perencanaan ke depan dengan lebih baik bagi dirinya maupun bagi pembangunan masyarakat.

Akhirnya, *Gaudium et Spes* memberi pesan bagi kaum Katolik Indonesia bahwa politik itu penting bagi Gereja. Melalui politik (teori yang selaras dengan praktek oleh para politisi), kesejahteraan umum dapat diciptakan. Karena itu, Gereja Katolik Indonesia mendorong kaum beriman Katolik untuk menaruh minat dan menyiapkan diri untuk

mengambil bagian dalam dunia politik sekaligus mengingatkan agar mereka yang terjun ke dunia politik harus memiliki integritas moral dan kebijaksanaan.

Karena hanya mereka yang memiliki integritas moral dan kebijaksanaan berani menentang setiap bentuk ketidakadilan dan penindasan, melawan kesewenangan dan intoleransi terhadap orang atau kelompok lain. Seorang politisi Katolik yang baik adalah seorang yang adil dan jujur, yang membaktikan dirinya demi kepentingan seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

ALKITAB

Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Deuterokanonika*, Jakarta: LAI, 2000

DOKUMEN-DOKUMEN GEREJA

Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja Dalam Dunia Dewasa Ini*, dalam Hardawiryana, R. (penerj.), Jakarta: Obor, 1993

_____, *Lumen Gentium, Konstitusi Dogmatis Tentang Terang Para Bangsa*, dalam Hardawiryana, R., (penerj.), Jakarta: Obor, 1993

Leo XIII, *Ensiklik Immortale Dei*, dalam Seri Dokumen Gerejawi 30, Jakarta: DOKPEN KWI, 2005

Yohanes XXIII, *Ensiklik Pacem In Teris*, dalam Seri Dokumen Gerejawi 56, Jakarta: DOKPEN KWI, 1999

Yohanes Paulus II, *Ensiklik Populorum Progressio*, dalam Hardawiryana, R. (penerj.), Jakarta: DOKPEN KWI, 1994

_____, *Ensiklik Centesimus Annus*, dalam Hardawiryana R. (penerj.), Jakarta: DOKPEN KWI, 1994

_____, *Populorum Progressio, Ensiklik Tentang Perkembangan Bangsa-Bangsa*, dalam R. Hardawiryana, SJ. (penerj.), Jakarta: DOKPEN KWI, 1994

KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Hoetomo M., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987

Sugiyono, Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

BUKU-BUKU

Banawiratman, J.B., *Gereja Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Kanisius, 1987

Bertens, K., *Perspektif Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2001

_____, *Keprihatinan Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 2003

- _____, ***Etika***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Budiardjo, ***Politik Dalam Kajian Filsafat*** Yogyakarta: Kanisius, 1981
- Cahyadi, T. Krispurwana, ***Katolik Dan Politik***, Jakarta: Obor, 2006
- Gani, Soelistiati Ismail, ***Pengantar Ilmu Politik***, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1984
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, ***Moral dan Masalahnya***, Yogyakarta: Kanisius, 1990
- Haryatmoko, ***Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi***, Jakarta: Gramedia, 2011
- _____, ***Etika Politik dan Kekuasaan***, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003
- Kieser, Bernhard, ***Solidaritas 100 Tahun Ajaran sosial Gereja***, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Kristiyanto, Eddy (ed.), ***Etika Politik Dalam Konteks Indonesia***, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Ngelow, Zakaria J. dkk. (ed.), ***Teologi Politik: Panggilan Gereja di Bidang Politik Pasca Orde Baru***, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Peschke, Karl-Heinz, ***Etika Kristiani Jilid I: Pendasaran Teologi Moral***, Maumere: Ledalero, 2003
- _____, ***Etika Kristiani Jilid IV: Kewajiban Moral Dalam Hidup Sosial***, Maumere: Ledalero, 2003
- S. Kaelan M., ***Filsafat Pancasila***, Yogyakarta: Paradigma, 2009
- Sema, Mansyur, ***Negara Dan Korupsi***, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008
- Strong, C. F., ***Konstitusi-Konstitusi Politik Modern***, Bandung: Nusamedia, 2004
- Sugiyono, Yeyen Maryani, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Suseno, Franz Magnis, ***Etika Politik***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987
- _____, ***13 Model Pendekatan Etika***, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Tanner, Norman P., ***Konsili-Konsili Gereja-Sebuah Sejarah Singkat***, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Teichman, Jenny, ***Etika Sosial***, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Wong, Peter Suwandi, ***Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus Dalam Konteks Masa Kini***, Surabaya: Momentum, 2005
- DIKTAT/MODUL**
- Jegalus, Norbertus, ***Filsafat Nusantara*** (modul), Kupang: Fakultas Filsafat, 2018

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hergianus Jebarus

Tempat dan Tanggal Lahir : Borong-Manggarai Timur, 23 Maret 1991

Riwayat Pendidikan Umum :

- **SDK Ranaloba Borong-Manggarai Timur (1998-2005)**
- **SMP Negeri 1 Borong-Manggarai Timur (2005-2008)**
- **SMA Katolik Pancasila Borong-Manggarai Timur (2008-2011)**
- **Fakultas Filsafat Agama, UNWIRA-Kupang (2014-2018)**

Riwayat Pendidikan Calon Imam:

- **Masa Aspiran di Pra Novisiat Claret, Kupang (2011-2012)**
- **Masa Postulan di Pra Novisiat Claret, Kupang (2012-2013)**
- **Masa Novisiat di Benlutu-Soe (2013-2014)**
- **Masa Profes di Seminari Hati Maria, Kupang (2014-2018)**